

|             |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B<br>L<br>N | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN |
|             | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |

|             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| T<br>G<br>L | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|             | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

**2021**



JAWA POS

KEDAULATAN RAKYAT

HARIAN JOGJA

KOMPAS

HAL. 1

**DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19**

**Perekonomian di DIY Alami Kontraksi 6,74 %**

**YOGYA (KR)** - Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak cukup serius di bidang ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bahkan dampak dari pandemi tersebut tidak hanya terjadi di level nasional, tapi juga di daerah termasuk DIY. Untuk DIY sendiri, kondisi perekonomian mengalami kontraksi cukup dalam di angka 6,74 persen dengan pencapaian di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X ketika menerima Tim Pemeriksa Pendahuluan Kinerja Pariwisata DIY oleh BPK RI Perwakilan DIY, yang dipimpin Jariyatna di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Senin (11/1). Dalam pertemuan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna selain menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa juga menyerahkan hasil pantauan BPK kepada Wakil Gubernur DIY.

Menurut Wagub DIY, pemeriksaan kinerja pariwisata yang dilakukan

BPK nantinya dapat melihat upaya pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi melalui pariwisata. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan bisa menjadi acuan. Selain itu rekomendasi yang diberikan nantinya akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung peningkatan kualitas pariwisata di DIY.

Hal itu penting karena pemulihan ekonomi DIY berpijak pada salah satu keunggulan DIY yaitu pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik yang saat ini bertambah, menjadi pendongkrak perekonomian.

"Pandemi Covid-19 membuat pemulihan pariwisata DIY tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena saat ini ada perubahan preferensi wisatawan pada fase normal dimana wisatawan lebih mengutamakan faktor higienitas baik pada akomodasi, tempat wisata dan amenitasnya," terangnya.

Sedangkan Jariyatna mengatakan, mulai tahun ini BPK melakukan Pemeriksaan LKPD Instansi Tahun

Anggaran 2019/2020 dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Kinerja Pariwisata dan instansi terkait lainnya di DIY. Bahkan pemeriksaan yang sama telah dilakukan tahun lalu di 5 Provinsi bersamaan dengan pemeriksaan Keuangan LKPD dibarengkan dengan pemeriksaan Kinerja. Hal tersebut dilakukan dengan harapan BPK akan memberikan nilai tambah pada penyerahan laporan opini maupun dalam laporan keuangan dari hasil pemeriksaan tersebut.

"Mengapa dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK. Karena untuk meningkatkan manfaat pemeriksaan dan tema yang dipilih Pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut OPD di provinsi maupun di Kabupaten/Kota kami minta memberikan data yang komprehensif. Mengingat bidang pariwisata mengelola anggaran terbesar dibanding bidang lainnya. Sehingga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuhnya perekonomian," paparnya. **(Ria)-d**

*Ria*